

PERAN KEPALA DESA DAN APARAT DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA PASAR SABTU KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Latipah¹, Sugianor², Arpandi³

Program Studi administrasi Publik

Sekolah tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Email : ipahhhh2@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang ditemui yaitu kurangnya peran Kepala Desa dalam menentukan arah perencanaan, komunikasi, dan membangun budaya organisasi yang positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dan aparat desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembangunan di desa Pasar Sabtu. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peran Kepala Desa dan Aparat Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Pasar Sabtu kurang baik, dapat dilihat dari : *Pertama* pada indikator tujuan kurang baik, *Kedua* pada indikator keputusan karena belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, *Ketiga* pada indikator pelaksanaan kurang baik karena belum sesuai dengan rencana, *Keempat* pada indikator komunikasi kurang baik, *Kelima* pada indikator tantangan kurang baik karena kepala desa kesulitan dalam memecahkan perbedaan pendapat antara masyarakat satu dengan yang lain. Faktor penghambatnya : keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan belum terlibatnya berbagai elemen masyarakat dalam menentukan dan *Ketiga* kurangnya komunikasi. Faktor pendukungnya yaitu adanya pembagian tugas dalam proses pembangunan dan alokasi dana desa yang digunakan dengan baik. Penulis merekomendasikan perbaikan lebih lanjut dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat untuk menghindari kendala komunikasi. Berpartisipasi dalam pelatihan perencanaan pembangunan dan memberikan laporan keuangan dan kemajuan proyek secara tepat waktu, terbuka bagi masyarakat.

Kata kunci : Peran, Kepala Desa dan Aparat Desa, Pembangunan

ABSTRACT

The problems encountered are the lack of role of the Village Head in determining the direction of planning, communication, and building a positive organizational culture. This study aims to determine the role of the village head and village officials and the factors that influence development in Pasar Sabtu village. This research method uses a qualitative descriptive type. Data collection techniques through interviews, observations and documentation. The results of this study conclude is not good, as can be seen from: First, the objective indicator is not good, Second, the decision indicator because it has not fully involved the community, Third, the implementation indicator is not good because it is not in accordance with the plan, Fourth, the communication indicator is not good, Fifth, the challenge indicator is not good because the village head has difficulty in resolving differences of opinion between one community and another. The inhibiting factors are: limited human resources (HR) and the lack of involvement of various elements of society in determining and Third, lack of communication. The supporting factors are the division of tasks in the development process and the allocation of village funds that are used properly. The author recommends further improvements and establishing good relations with the community to avoid communication obstacles. Participate in development planning training and provide timely financial and project progress reports, open to the community.

Keywords: Role, Village Head and Village Apparatus, Development

PENDAHULUAN

Menurut kesatuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan kata lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam peraturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun kepala desa dengan melalui pemerintah desa dapat diberi penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan urusan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Peran kepala desa dan aparat desa dalam mengatur sumber daya masih belum bisa dikatakan efektif, efisien dalam mendukung pencapaian tujuan. Hal ini dapat dilihat karena masih banyak kebutuhan dan kenyamanan masyarakat yang kurang terpenuhi seperti halnya penambahan sarana dan prasarana dibidang pengelolaan sampah dan posyandu desa yang seharusnya diprioritaskan.

Kepala Desa dan aparat desa masih belum bisa sepenuhnya mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang peraturan dalam pembangunan dan partisipasi masyarakat sebagai pendukung bagi kepala desa, yaitu sebagai pelopor desa (panutan), sehingga masyarakat desa masih banyak yang menentang atau tidak setuju atas pembangunan yang kepala desa selenggarakan dan bisa menyebabkan perdebatan antara masyarakat dan kepala desa serta aparatnya.

Hal tersebut sangat penting, karena pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Karena itu. Peran mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun beberapa permasalahan yang terjadi berdasarkan observasi awal dan wawancara peneliti menemukan beberapa masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Masih kurangnya peran Kepala Desa dalam menentukan arah perencanaan proyek infrastruktur pembangunan desa, yang menunjukkan adanya hambatan yang menghambat kemajuan pembangunan di tingkat desa. Pada dasarnya Kepala Desa memiliki peran kunci dalam merumuskan visi dan arah pembangunan untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur yang dilakukan sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat yang ditandai dengan kurangnya keterlibatan dan komunikasi yang efektif antara kepala desa dan masyarakat yang menyebabkan

ketidaksesuaian antara rencana pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, Program Jalan Usaha Tani atau yang dikenal dengan sebutan JUT yang sudah lama dibangun. Namun, kurangnya pengarahan perawatan dari pemerintahan desa dan masyarakat setempat. *(Sumber: Data Rancangan Pembangunan)*

2. Kurangnya komunikasi antar semua pihak yang terkait dalam pembangunan desa seperti penduduk desa, pemerintahan desa, lembaga pemerintahan terkait, organisasi dan non-organisasi yang mencapai kepentingan dan peran dalam tujuan pembangunan desa. Hal ini dapat menghambat pengembangan keterampilan dengan kata lain ketidak mampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak oleh kepala desa dan aparat desa. Ketidak optimalnya komunikasi menyebabkan potensi sumber daya manusia (SDM) di desa tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan desa. Selain itu, rendahnya tingkat komunikasi juga berdampak pada minimnya pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan desa, keterbatasan ini membuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menjadi terhambat. *(Sumber: Daftar Hadir Rapat Desa)*
3. Masih belum maksimalnya peran Kepala Desa dalam hal membantu pihak-pihak yang mempunyai konflik untuk mencapai kesepakatan, dengan kata lain orang yang secara netral tidak memihak siapa pun dan fokus untuk membantu kedua belah pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan. Hal ini dapat menghambat kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan yang menciptakan ketegangan antara stakeholder yang terlibat. Disisi lain kurangnya peran kepala desa sebagai penyatu didalam berbagai stakeholder yang terkait dalam pembangunan desa, menunjukkan ketidakmampuannya untuk membangun sinergi dan kerjasama yang kokoh diantara berbagai pihak. *(Sumber: Daftar Hadir Musyawarah Desa)*
4. Kurangnya peran Kepala Desa dalam membangun budaya organisasi yang positif dalam pemerintahan desa yang menimbulkan dampak signifikan terhadap efektivitas dan keberlanjutan pembangunan desa. Sebagai pemimpin di tingkat desa, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan program pembangunan desa kepada masyarakat, menjelaskan kebijakan desa, dan mewakili desa dalam berbagai pertemuan dan forum diskusi. Kepala desa yang tidak aktif dalam membangun budaya organisasi yang positif dapat menyebabkan ketidakjelasan visi dan misi organisasi, kurangnya komunikasi yang efektif serta menurunnya motivasi. Misalnya, organisasi karang taruna dalam segi pelatihan pembuatan sasirangan yang sekarang tidak beroperasi lagi sebab tidak ada partisipasi dari masyarakat yang ingin menjalankannya. *(Sumber: Dokumentasi Foto)*
5. Masih belum maksimalnya peran Kepala Desa dan Aparat Desa dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. Pada dasarnya Kepala Desa sebagai pemimpin di tingkat desa yang memiliki peran krusial sebagai integrator yang berperan dalam menyatukan elemen di desa termasuk masyarakat, perangkat desa dan organisasi kemasyarakatan untuk mencapai tujuan bersama yaitu pembangunan desa yang berkelanjutan. Namun, hal ini berujung pada kurangnya komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, yang berdampak pada beberapa hal yaitu, masyarakat tidak memahami dengan baik program yang dijalankan, menimbulkan kesalahpahaman bahkan konflik antara masyarakat dan pemerintahan desa dan partisipasi aktif masyarakat. *(Sumber: Daftar Hadir Sosialisasi Desa)*

Peran

Sulistyowati (2015:210-211) menjelaskan bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah

untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peran juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Ada 4 tahapan tentang perilaku yang berkaitan dengan peran, yaitu:

a. Harapan tentang Peran (*expection*)

Peran apa saja yang dimiliki oleh seseorang individu seharusnya dijalankan sesuai dengan harapan tersebut, banyak orang berharap tentang peran harus dilaksanakan oleh seseorang individu sesuai dengan harapan orang banyak, sehingga melahirkan perilaku yang cocok dan pantas, orang yang memiliki peran tertentu harus menjadi contoh bagi orang lain, apabila peran cocok dengan statusnya, akan menjadi referensi bagi anak, siswa, mahasiswa, dan masyarakat. Seperti peran orang tua sebagai contoh bagi anak-anaknya, guru menjadi contoh bagi siswanya, pemimpin sebagai contoh bagi masyarakatnya, dan dosen mampu membimbing mahasiswa dengan baik seperti dengan menumbuhkan nilai-nilai kejujuran.

b. Norma (*Norm*)

Norma merupakan salah satu bentuk harapan bersama dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya harapan dapat dibagi kepada dua macam. *Pertama*, harapan yang mungkin dapat diprediksi, seperti memprediksi suatu perilaku yang akan terjadi pada masa akan datang. *Kedua*, harapan dogmatis, yaitu suatu harapan harus disertai dengan sebuah peran yang sesuai.

c. Wujud perilaku dalam peran (*Performance*)

Perilaku merupakan wujud dari peran yang diberikan kepada seseorang . artinya, perilaku bukan lagi sekedar harapan, tetapi sudah merupakan perilaku nyata dan dapat dilihat. Berbeda dengan norma harapan, perilaku dari individu dengan individu lainnya.

d. Penilaian dan Sanksi (*Evaluation and Sanction*)

Dinamika yang terjadi sulit membedakan antara penelitian dengan sanksi.

Penilaian seorang individu dapat diberikan sanksi, kalau tidak ada penilaian sanksi juga tidak ada. Maka, dapat dipahami bahwa peran antara penilaian dan sanksi satu kesatuan tidak dapat dipisahkan. Istilah peran dalam kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di peserta didik. Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya.

Kemudian menurut Biddle memperkenalkan lima jenis peran, meliputi:

1. *Fungsionalisme role theory* (teori peran fungsional) yang memfokuskan pada peran dan tingkah laku seseorang yang khusus yang memiliki kedudukan sosial dalam sistem sosial yang stabil.
2. *Symbolic Interactionist Role Theory* (teori peranintcarksional yang simbolis) yang memfokuskan pada peranan aktor secara individual, evaluasi peran tersebut melalui interaksi sosial dan bagaimana pemegang peranan sosial memahami dan menginterpretasikan sebuah tingkah laku.
3. *Structural Role Theory* (teori peran struktural) yang memfokuskan pada struktur sosial atau kedudukan sosial yang sama-sama menanggung pola tingkah laku yang sama, yang ditujukan pada kedudukan sosial yang lain.
4. *Organitation role theory* (teori peran organisasi) yang memfokuskan kepada peran yang dihubungkan dengan kedudukan sosial pada sistem sosial yang hirarkis, yang berorientasi pada tugas dan belum direncanakan.
5. *Cognitive role theory* (teori peran kognitif) yang difokuskan pada hubungan-hubungan antara tingkah laku dan harapan yang terdapat dalam peran.

Fungsi Kepemimpin

Fungsi kepemimpinan adalah tentang cara para manajer memotivasi para pekerja untuk bekerja dan melaksanakan rencana-rencana manajemen dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka.

Menurut Sondang S. P. Siagian (1999:42-43), fungsi-fungsi kepemimpinan meliputi:

1. Pimpinan sebagai Penentu Arah

Setiap organisasi dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu. Arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Perumus dan penentu strategi dan taktik tersebut adalah pimpinan dalam organisasi tersebut.

2. Pimpinan sebagai Wakil dan Juru Bicara Organisasi

Kebijaksanaan dan kegiatan organisasi perlu dijelaskan kepada pihak luar agar pihak tersebut mempunyai pengetahuan yang tepat tentang kehidupan organisasi yang bersangkutan, dan yang paling bertanggung jawab sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan berbagai pihak tersebut adalah pimpinan organisasi. Pimpinan perlu mengetahui keputusan lain yang telah dibuat oleh pimpinan yang lebih rendah. Serta, pengetahuan tentang berbagai kegiatan yang berlangsung dalam organisasi sebagai pelaksanaan dari berbagai keputusan yang telah diambil.

3. Pimpinan sebagai Komunikator yang Efektif

Pemeliharaan hubungan baik ke luar maupun ke dalam dilakukan melalui proses komunikasi. Interaksi yang terjadi antara sesama anggota dalam suatu organisasi dimungkinkan karena komunikasi yang efektif. Komunikasi sangat diperlukan pimpinan dalam menyampaikan suatu keputusan dalam rangka pengendalian dan pengawasan, pengerahan bawahan dan menyampaikan informasi kepada pihak lain.

4. Pimpinan sebagai Mediator

Dalam kehidupan organisasional, selalu ada saja situasi konflik yang harus diatasi, baik dalam hubungan ke luar maupun dalam hubungan ke dalam organisasi. Fungsi pimpinan sebagai mediator dalam hal ini difokuskan pada penyelesaian situasi konflik yang mungkin timbul dalam organisasi. Timbulnya situasi konflik dalam organisasi merupakan tantangan yang harus dihadapi pimpinan. Untuk mengatasinya secara rasional, objektif, efektif, dan tuntas, dituntut kemampuannya berperan sebagai seorang mediator yang andal.

5. Pimpinan sebagai Integrator

Adanya pembagian tugas, sistem alokasi daya, dana dan tenaga, serta diperlukannya spesialisasi pengetahuan dan keterampilan dapat menimbulkan sikap, perilaku, dan tindakan yang berkotak-kotak. Oleh karena itu, diperlukan integrator terutama pada hierarki puncak, yaitu pimpinan. Hanya pimpinanlah yang berada di atas semua orang dan semua satuan.

Kepala Desa

Kepala Desa merupakan seorang pemimpin pemerintahan di Desa dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan lagi apabila terpilih. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kenijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan ini, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih secara langsung oleh masyarakat desa.

Aparat Desa

Aparat Desa merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat desa yang bertanggung jawab atas berbagai tugas administrative dan teknis untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik. Mereka bekerja di bawah koordinasi dan pengawasan kepala desa dalam menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Pembangunan Desa

Qomarullah (2023:151) Secara umum pembangunan adalah suatu proses perubahan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan manusia yang meliputi peningkatan taraf hidup, kesehatan, pendidikan dan pemerataan. Karena dasar dari proses perubahan tersebut adalah bidang ekonomi, maka pengertian pembangunan olahraga seringkali lebih menitikberatkan pada pengertian pembangunan yang bersifat ekonomis, yaitu:

1. Pencapaian kesejahteraan individu (atlet, pelatih), seringkali diukur sebagai pendapatan per kapita;
2. Memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup secara umum; dan
3. Pemenuhan harga diri (*self-worth and self- respect*).

Pembangunan adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia.

METODE

Penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Pasar Sabtu Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beralamat di Jalan Teluk Setia Desa Pasar Sabtu RT.01 Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kode Pos 71455. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan informan secara purposive sampling berjumlah 14 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi.

PEMBAHASAN

Peran Kepala Desa dan Aparat Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Pasar Sabtu Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Peran Kepala Desa dan Aparat Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Pasar Sabtu Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara dari teori Menurut Sondang S. P. Siagian (1999), di kutip dalam buku Harries Madiistriyatno (2019:42-43) fungsi-fungsi kepemimpinan meliputi Pimpinan sebagai Penentu Arah, Pimpinan sebagai Wakil dan Juru Bicara Organisasi, Pimpinan sebagai Komunikator yang Efektif, Pimpinan sebagai Mediator dan Pimpinan sebagai Integrator. Peran Kepala Desa dan Aparat Desa merupakan suatu hal yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan desa, maka dibuatlah indicator sebagai berikut :

1. Pimpinan sebagai Penentu Arah

a. Arah Tujuan

Peran kepala desa dan aparat desa dalam menentukan arah tujuan Pembangunan desa masih kurang baik karena tujuan dan rancangan belum sesuai visi misi kepala desa

yang jelas untuk mewujudkan Desa Pasar Sabtu sebagai desa yang maju, sejahtera, mandiri dalam segala bidang aspek untuk memajukan pembangunan desa dimana dalam pembangunan tersebut masih ada yang tidak sesuai dengan keinginan Masyarakat seperti Pembangunan tempat sampah dan Pembangunan penerangan jalan.

b. Strategi

Peran kepala desa dan aparat desa dalam menentukan strategi Pembangunan desa cukup baik karena sudah di jalankan namun masih kurang musyawarah desa dan sosialisasi dengan masyarakat setempat. sehingga pembangunan jalan usaha tani masih dibangun diwilayah tanah milik desa. Bahkan ada beberapa pembangunan yang tidak diketahui perkembangannya oleh masyarakat desa.

2. Pimpinan sebagai Wakil dan Juru Bicara Organisasi

a. Keputusan

Peran kepala desa dan aparat desa dalam mengambil Keputusan untuk membangun Pembangunan desa masih kurang baik karena masih tidak melibatkan Masyarakat luas dalam pengambilan Keputusan hal tersebut dapat dilihat dari daftar hadir musyawarah atau sosialisasi desa, hanya dihadiri oleh tokohnya saja tidak melibatkan Masyarakat luas.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pembangunan masih kurang baik dikarenakan Pembangunan masih adanya *miss* dengan kebutuhan yang diharapkan Masyarakat sehingga Pembangunan tersebut masih belum dapat dirasakan Masyarakat luas seperti Pembangunan lampu untuk penerangan jalan masih belum di bangun untuk sebagian desa seperti pada malam hari jalan di desa masih gelap sehingga sulit di lalui untuk sendiri dan pengadaan tempat sampah untuk Masyarakat membuang sampah masih tidak banyak sehingga kadang sampah masih berserakan dimana-mana.

3. Pemimpin sebagai Komunikator yang Efektif

a. Komunikasi

Peran kepala desa dan aparat desa dalam komunkasi masih kurang baik Dimana Pembangunan masih tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Masyarakat seperti Pembangunan lampu untuk penerangan jalan masih belum di bangun sehingga sebagian desa seperti pada malam hari jalan di desa masih gelap sehingga sulit di lalui untuk sendirian dan pengadaan tempat sampah untuk Masyarakat membuang sampah masih tidak banyak sehingga kadang sampah masih berserakan. dimana hal tersebut merupakan kebutuhan Masyarakat untuk dipenuhi dan juga menjaga kebersihan desa masih belum terpenuhi.

b. Pengawasan

Peran kepala desa dan aparat desa dalam melakukan pengawasan Pembangunan cukup baik seperti Pembangunan jalan utama pertanian yaitu jembatan dan penyediaan air bersih untuk Masyarakat di awasi dengan baik dan dibantu Masyarakat dalam pembangunan dimana Pembangunan dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan.

4. Pimpinan sebagai Mediator

a. **Tantangan**

Peran kepala desa dan aparat desa dalam menghadapi tantangan Pembangunan desa kurang baik terlihat peran kepala desa memecahkan perbedaan pendapat antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain dan masih ada tantangan yang lain dalam Pembangunan seperti Pembangunan lampu untuk penerangan jalan, masyarakat masih mempertanyakan kapan hal itu akan ditindak lanjuti.

b. **Kemampuan**

Peran kepala desa dan aparat desa dalam meningkatkan kemampuan pelaksanaan Pembangunan desa cukup baik dilihat Pembangunan desa berjalan dengan lancar sampai selesai seperti Pembangunan penyediaan air bersih untuk Masyarakat dan pembuatan jalan utama tani seperti jembatan dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan.

5. **Pimpinan sebagai Integrator**

a. **Pembagian Tugas**

Peran kepala desa dan aparat desa dalam dalam pembagian tugas untuk melaksanakan Pembangunan desa sudah baik terlihat dari kemampuan masing-masing pelaksana yang di berikan tanggung jawab untuk menjalankan tugas tersebut sehingga Pembangunan berjalan dengan lancar yaitu Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT).

b. **Sistem alokasi dana**

Peran kepala desa dan aparat desa dalam dalam sistem alokasi dana untuk melaksanakan Pembangunan desa sudah baik karena dari setiap kegiatan pembangunan ada hitungan yang membuktikan bahwa anggarannya digunakan dengan baik sehingga dapat dikatakan dengan anggaran itu cukup untuk membangun suatu pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Hal ini sesuai dengan teori Menurut Sondang S. P. Siagian (1999) di kutip dalam buku Harries Madiistriyatno (2019:42-43) yang berpandangan bahwa peran pemimpin dalam pembagian tugas sangat mempengaruhi kelancaran Pembangunan desa.

Faktor Penghambat

Faktor Penghambat adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghalangi, menahan dan memperlambat terjadinya sesuatu pekerjaan yang ada pada Kantor Desa Pasar Sabtu maka dari itu mengetahui pemahaman Peran Kepala Desa dan Aparat Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pasar Sabtu Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam faktor penghambat sebagai berikut:

- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)
- Belum terlibatnya berbagai elemen masyarakat dalam menentukan Tujuan
- Kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat

Faktor Pendukung

- Adanya Pembagian Tugas Setiap Proses Pembangunan
- Alokasi Dana Desa yang digunakan dengan Baik



SIMPULAN

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peran Kepala Desa dan Aparat Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Pasar Sabtu kurang baik, dapat dilihat dari : *Pertama* pada indikator tujuan kurang baik karena belum sesuai dengan visi misi kepala desa, *Kedua* pada indikator keputusan karena belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, *Ketiga* pada indikator pelaksanaan kurang baik karena belum sesuai dengan rencana atau harapan yang ditetapkan, *Keempat* pada indikator komunikasi kurang baik karena masyarakat kekurangan wadah untuk menyampaikan aspirasinya, *Kelima* pada indikator tantangan kurang baik karena kepala desa kesulitan dalam memecahkan perbedaan pendapat antara masyarakat satu dengan yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja Pegawai adalah faktor penghambatnya *Pertama* yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), *Kedua* belum terlibatnya berbagai elemen masyarakat dalam menentukan dan *Ketiga* kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Sedangkan faktor pendukungnya *Pertama* yaitu adanya pembagian tugas dalam proses pembangunan dan *Kedua* alokasi dana desa yang digunakan dengan baik.

Berdasarkan temuan tersebut, Kepala Desa Pasar Sabtu merekomendasikan perbaikan lebih lanjut dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat untuk menghindari kendala komunikasi. Aparat Desa Pasar Sabtu masih perlu diperhitungkan. Berpartisipasi dalam pelatihan perencanaan pembangunan dan memberikan laporan keuangan dan kemajuan proyek secara tepat waktu, terbuka bagi masyarakat dan menjaga keterlibatan aktif masyarakat dalam diskusi desa

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Affrian, R. (2022) 'Pemberdayaan Kelompok Tani Budi Karya Desa Ampukung Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong', *Administraus*, 6(3), pp. 98–111.

Anshari, M.R. (2021) 'KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL CAMAT DI KANTOR KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Cross-border*, 4(2), pp. 304–323.

Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.

Arlan, A.S. (2023) 'Kinerja Dinas Perpustakaan Untuk Peningkatan Minat Membaca Masyarakat Tapin', *Administraus*, 7(3), pp. 20–26.

Baihaqi, A. (2022) 'Kinerja Pegawai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Kantor Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 1–17.

Berkatillah, A., Baihaqi, A. and Rahman, A.A. (2023) 'PENGARUH MOTIVASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), pp. 3005–3015.

Febriadi, H. (2021a) 'DISIPLIN KERJA APARATUR PADA KANTOR DESA TAMBALANG RAYA KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 3(1), pp. 40–52.



- Febriadi, H. (2021b) 'MOTIVASI PIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administraus*, 5(1), pp. 1–17.
- Febriadi, H. (2021c) 'UPAYA PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PROGRAM KERJA PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Al'iidara Balad*, 3(2), pp. 40–57.
- Noorrahman, M.F. (2023) 'Peran Komunikasi Antar Budaya terhadap Adaptasi Mahasiswa Perantau di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai', *TASHWIR*, 11(02), pp. 137–148.
- Noorrahman, M.F., Sairin, M. and Janati, J. (2023) 'PERAN DUKUNGAN SOSIAL DALAM MENGURANGI PRASANGKA SOSIAL PADA MAHASISWA BARU YANG BERSTATUS SEBAGAI MAHASISWA PENDATANG', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(5), pp. 1751–1756.
- Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) 'Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI "GUSI")', *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.
- Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) 'PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.
- Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.
- Raudah, S. and Mujahadah, S. (2023) 'PENGARUH MUTASI TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 18–24.
- Setiawan, I. (2022) 'Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 15(2), pp. 331–339.
- Setiawan, I. (2023) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara', *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.
- Setiawan, I. (2024) 'Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.
- Trio, S. *et al.* (2023) 'Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province', *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.
- Faradiba, 2023. *Monograf Akselerasi Pembangunan Beserta Dampak Lingkungannya*. Sumedang, Jawa Barat : CV. Mega Press Nusantara.
- Harries Madiistriyatno, 2019. *Pemimpin dan Memimpin*. Yogyakarta : CV Bintang Surya Madani.
- Nugroho Riant. 2021. *Keamanan Desa*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Prayitno Gunawan. 2022. *Perencanaan Desa Terpadu*. Malang : UB Media.
- Qomarrullah Rif'iy, 2023. *Filantropi Sains Sosiologi dalam Pembangunan Olahraga Nasional*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Rahayu Sri Rahayu, 2018. *Pemerintahan Daerah*. Jawa Timur : Sinar Grafika



Rustyan Tabrani. 2022. *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*. Jakarta : : Bumi Aksara.

Sondang P. Siagian., M.P.A. 2014. *Aministrasi Pembangunan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Sulistiyowati, W. 2018. *Buku Ajar Kualitas Layanan: Teori Dan Aplikasinya*. Umsida Press.
<https://doi.org/10.21070/2018/978-602-591-436-2>

.